

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Aisyah, S., Gani, A. J. A., & Muluk, M. R. K. (2012). Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat di Kota Surabaya. *Wacana*, 15(3), 42–50.
- Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 54–65.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Adminsitrasi Negara* (B. A. Saebani (ed.); 2nd ed.). Pustaka Setia.
- Asiru, R. (2011). Kebijakan Publik Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 60–64. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.19>
- bangsaonline.com. (2016). “Makan” Lahan Produktif, Pembangunan Ring Road Tuban Ditolak Petani. <https://bangsaonline.com/berita/23262/makan-lahan-produktif-pembangunan-ring-road-tuban-ditolak-petani>
- bangsaonline.com. (2020). Saluran Irigasi Diuruk Materalial, Kepala PUPR Sebut Ada Miskomunikasi. <https://bangsaonline.com/berita/79818/saluran-irigasi-diuruk-material-kepala-pupr-tuban-sebut-karena-miskomunikasi>
- Gayatri, D. D. (2012). *Pemanfaatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Dalam Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Di Kota Cilegon*. Uiversitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Hasanah, U., & Sari, W. I. (2020). Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Lingkar

- Kecamatan Siborongborong. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, 4(1), 71–80.
- Hasibuan, H., Yusnadi, & Purba, S. (2016). Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. *Pendidikan Dan Kepengawasan*, 3(2), 33–49. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>
- Iriyena, P., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kaimana 2007-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 49–59.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik* (1st ed., Vol. 4, Issue 1). UNG Press Gorontalo.
- Karuniawan, M. H., & Fauziah, L. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO (Studi Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo). *JKMP*, 3(2), 117–240.
- Keusuma, C. N., & Suriana. (2015). PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1).
- Khamdan, A. (2016). Sistem Kemitraan Program Si Bule Albino melalui Kelembagaan Bisnis oleh Perusahaan Tambang di Kec. Binuang Kab. Tapin. *Jurnal AdBispreneur*, 1(1), 73–84.
- Kirana, A., Noor, M., & Dama, M. (2019). PEMBANGUNAN

- INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN LAHAM KABUPATEN MAHAKAM ULU. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 781–796.
- kumparan.com. (2018). *Lobi Gagal, Ring Road Bertumpu APBD*.
<https://m.kumparan.com/amp/suarabanyuurip/lobi-gagal-ring-road-bertumpu-apbd>
- Kurniati, P. S. (2016). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung. *Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(2), 101–112.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL DONALD VAN METTER DAN CARL VAN HORN. *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78.
- Kurniawan, W. P., & Rahaju, T. (2019). PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR BARAT KOTA SURABAYA (Studi pada Wilayah Terdampak Pembangunan di Kelurahan Sememi). *Publika*, 6(6).
garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1575191
- Mahadiansar, Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(1), 77–92.
<https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara* (R. Kurniawan, B. Rahman, & H. Iskandar (eds.); 1st ed., Vol. 4, Issue 1). Unimal Press.
- Muhammad, M. (2017). Perencanaan Pembangunan. In Nurmayah (Ed.), *Cv*.

DUA BERSAUDARA. CV.Dua Bersaudara.

Musra, A. (2014). Faktor-faktor Penentu Keterlambatan Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 10(1), 70–82. <https://doi.org/10.14710/pwk.v10i1.7634>

NSS, R. L. P., Suryawardana, E., & Triyani, D. (2015). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2), 82–103. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.505>

Nuraini, Z. (2017). *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan*. Universitas Brawijaya.

Ompusunggu, V. M. (2019). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(9), 1689–1699.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012 - 2032, Pub. L. No. 09, 7 Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban 1 (2012).

Posumah, F. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*, 15(2), 1–13.

Prasetyo, R. B., & Firdaus, M. (2009). Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222–236.

- Pratama, F. S. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR DURI-PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS. *Jom FISIP*, 4(2), 1–15.
- Putra, W. M. (2014). Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah rakit Umum Kota Tangetang Selatan Tahun 2014. In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>
- Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004, Pub. L. No. 38 (2004).
- UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, 3 (2004).
- Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006, Pub. L. No. 38 (2006).
- Undang-Undang nomor 2 tahun 2012, (2012).
- Royanto, Idris, A., & Fitriyah, N. (2019). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman Di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau. *Jurnal Paradigma (JP)*, 7(3), 34. <https://doi.org/10.30872/jp.v8i1.2925>
- Sahutdege, C. D., Kiyai, B., & Laloma, A. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DALAM Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(32).

- Sekarsari, R. W., & Suyeno. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN KEDIRI. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 2(1), 12–25.
- suarabanyuurip.com. (2016). *Pembebasan Lahan JLS Tuban Digugat Warga*.
<https://suarabanyuurip.com/kabar/baca/pembebasan-lahan-jls-tuban-digugat-warga>
- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konse, Teori, dan Aplikasi)*. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); II). CV. ALFABETA.
- Surjana, O. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Ruang Publik Pantai Losari Makassar. *Jurnal Rekayasa Hijau*, 1(1), 53–61.
<https://doi.org/10.26760/jrh.v1i1.1337>
- Syafitri, Patton, A., & Djumadi. (2019). Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur di kecamatan malinau kota kabupaten malinau. *Jurnal Paradigma (JP)*, 8(2), 78–86.
- Tachan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina (eds.); 1st ed., Vol. 4, Issue 1). APII Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (H. Hadjarati (ed.); 1st ed.). PT.PUSTAKA INDONESIA PRESS JL.
- Taufiq, A. R. (2019). Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan

- Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit. *Jurnal Profita*, 12(1), 56.
<https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.005>
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (1st ed.). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Taufiqurokhman. (2015). Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM. In *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)* (1st ed., Vol. 53, Issue 9). 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Banyumedia.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Presindo.
- Yonatan, Fitriyah, N., & Margono, A. (2014). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. *E-Journal Administrative Reform*, 2(4), 2620–2632.
- Zaenal. (2017). *Implementasi Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkep*. Universitas Hasanuddin.
- Zulfian. (2014). Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi*, 1(2).